

Penerapan Akuntansi Akrual di Instansi Pemerintah: Tinjauan Literatur dan Tantangannya di Indonesia

Aulia Norlaisa Dewi^a, Monika Handayani^b

^aProdi Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah, Politeknik Negeri Banjarmasin,
Indonesia

^bProdi Sistem Informasi Akuntansi, Politeknik Negeri Banjarmasin, Indonesia

*Corresponding Author: monika.handayani@poliban.ac.id

Abstract

This research explores the implementation of accrual-based accounting in Indonesian government agencies and identifies the challenges encountered. Driven by the demands for reform in state financial management emphasizing transparency and accountability, this study employs a literature review methodology, analyzing various relevant sources. The findings indicate that accrual accounting enhances the quality of financial reports, supports data-driven decision-making, and strengthens public financial governance. However, significant obstacles persist, particularly regarding limited human resources, uneven information technology infrastructure, and disparities between central and regional government entities. This study recommends improving technical capacity, refining information systems, and strengthening cross-institutional coordination. The implications highlight the importance of an integrated approach focusing not only on regulation but also on resource readiness and supporting systems, to truly establish accrual accounting as a foundation for modern, transparent, and sustainable state financial governance.

Keywords: *Accrual Accounting, Government Accounting Standards, Implementation Challenges, Public Financial Reform*

Abstrak

Penelitian ini mengeksplorasi implementasi akuntansi akrual pada instansi pemerintah di Indonesia dan mengidentifikasi tantangan yang muncul. Berangkat dari tuntutan reformasi pengelolaan keuangan negara yang mengedepankan transparansi dan akuntabilitas, studi ini menggunakan metode literatur dengan menganalisis berbagai referensi relevan. Hasilnya menunjukkan bahwa akuntansi akrual meningkatkan kualitas laporan keuangan, mendukung pengambilan keputusan berbasis data, dan memperkuat tata kelola fiskal publik. Namun, kendala signifikan seperti keterbatasan SDM, infrastruktur TI yang tidak merata, serta disparitas antara pusat dan daerah masih menjadi penghambat. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan kapasitas teknis, perbaikan sistem informasi, dan penguatan koordinasi lintas institusi. Implikasinya menekankan pendekatan

terintegrasi yang mencakup regulasi, kesiapan sumber daya, dan sistem pendukung untuk mewujudkan tata kelola keuangan negara yang modern dan berkelanjutan.

Keywords: Akuntansi Akruwal, Standar Akuntansi Pemerintahan, Reformasi Keuangan Publik, Tantangan Implementasi

@IJAAF 2025 published by Politeknik Negeri Banjarmasin. All rights reserved.

1. Pendahuluan

Pemerintah Indonesia menghadapi tuntutan yang semakin meningkat untuk transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara. Selama reformasi sektor publik, terutama selama era otonomi daerah, transparansi dan akuntabilitas menjadi prioritas utama dalam tata kelola keuangan. Sebagai persyaratan dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, laporan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran harus dibuat dan dipresentasikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Sistem akuntansi pemerintah mengalami transformasi besar sebagai akibat dari amanat ini. Sistem akuntansi pemerintah beralih dari basis kas ke basis akrual dan akhirnya ke basis akrual penuh. Evolusi kebijakan akuntansi ini merupakan respons terhadap tuntutan akuntabilitas yang meningkat, baik dari publik maupun organisasi internasional seperti OECD, IMF, dan Bank Dunia. Pergeseran ini bukan sekadar perubahan teknis akuntansi, melainkan sebuah respons fundamental terhadap pengawasan yang lebih ketat terhadap pengelolaan dana publik.

Dalam hal perubahan ini, akuntansi memiliki peran strategis dalam meningkatkan tata kelola keuangan sektor publik. Akuntansi sangat penting untuk mengelola keuangan sektor publik, terutama untuk memastikan bahwa pengelolaan keuangan negara transparan dan akuntabel. Akuntansi menjadi penting bagi bisnis pemerintah karena membantu pengambilan keputusan berbasis data dengan memberikan informasi keuangan yang relevan kepada pemangku kepentingan. Penerapan akuntansi yang tepat dapat membantu pemerintah dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi kebijakan fiskal secara lebih efektif. Tujuan akuntansi sektor publik adalah untuk memberikan informasi keuangan yang tidak hanya digunakan untuk pelaporan tetapi juga memberi tahu masyarakat tentang bagaimana dana negara digunakan (Martadinata, 2024).

Secara global, banyak negara telah beralih ke sistem akuntansi yang bergantung pada akrual dalam rangka memperbaiki kualitas pelaporan keuangan dan meningkatkan efisiensi pengelolaan keuangan publik. Penerapan sistem ini telah terbukti mampu memperbaiki pengelolaan keuangan negara, sebagaimana terlihat di Australia dan Selandia Baru. Hal ini disebabkan oleh karakteristik akuntansi berbasis akrual yang mencatat

pendapatan serta beban pada saat hak dan kewajiban timbul, bukan ketika terjadi arus kas (Safari et al., 2024). Di Indonesia, pergeseran menuju akuntansi berbasis akrual dimulai melalui Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, yang kemudian diimplementasikan sepenuhnya sejak tahun 2015 sebagai bagian dari agenda reformasi pengelolaan keuangan negara (Subhi & Yuhertiana, 2021). Transformasi ini diharapkan mampu meningkatkan mutu informasi keuangan baik di tingkat pemerintah pusat maupun daerah.

Artikel ini berfokus pada analisis penerapan akuntansi berbasis akrual di lingkungan instansi pemerintahan, dengan penekanan khusus pada konteks Indonesia. Selain itu, artikel ini juga berusaha mengidentifikasi beragam hambatan yang dihadapi dalam proses implementasinya. Tantangan-tantangan tersebut dapat bersumber dari aspek sumber daya manusia, infrastruktur teknologi, maupun koordinasi antarinstansi. Studi literatur yang digunakan dalam artikel ini mencakup hasil-hasil penelitian sebelumnya, dokumen regulasi, serta pedoman kebijakan akuntansi pemerintah yang relevan. Dengan pendekatan ini, diharapkan diperoleh pemahaman menyeluruh mengenai kondisi riil penerapan akuntansi akrual serta berbagai hambatan yang mengiringinya (Lamonisi, 2016).

Signifikansi penelitian ini terletak pada kontribusinya terhadap penguatan tata kelola keuangan negara melalui pemahaman mendalam atas implementasi sistem akuntansi yang berbasis akrual. Temuan dari kajian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi praktis bagi instansi pemerintah dalam memperbaiki sistem pencatatan dan pelaporan keuangannya, serta membantu para pemangku kepentingan seperti auditor, pembuat kebijakan, dan akademisi dalam merumuskan strategi yang tepat untuk mengatasi hambatan yang ada. Dengan demikian, penerapan akuntansi akrual tidak hanya dilihat sebagai kewajiban administratif, tetapi sebagai langkah strategis menuju keuangan negara yang lebih transparan, akuntabel, dan berkelanjutan (Suwanda & Santosa, 2014).

2. Tinjauan Pustaka

Definisi dan Konsep Akuntansi Akrual Sektor Publik

Dalam Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), akuntansi berbasis akrual diartikan sebagai metode pencatatan yang mengakui pendapatan dan beban pada saat hak dan kewajiban timbul, tanpa bergantung pada waktu penerimaan atau pengeluaran kas. Pendekatan ini memungkinkan pencatatan seluruh pergerakan sumber daya secara menyeluruh, sehingga menghasilkan informasi yang lebih lengkap dan relevan untuk mendukung proses pengambilan keputusan. Di sisi lain, akuntansi sektor publik

merupakan sistem yang diterapkan oleh entitas pemerintah untuk keperluan pelaporan kepada masyarakat, meliputi proses identifikasi, pengukuran, pencatatan, hingga penyampaian informasi terkait transaksi ekonomi. Penerapan akuntansi akrual dalam sektor publik memiliki perbedaan mendasar dibandingkan sektor bisnis, karena fokus utamanya bukan pada perolehan laba, melainkan pada peningkatan akuntabilitas, pengelolaan sumber daya, serta penentuan biaya penyediaan layanan publik. Perbedaan tujuan ini sangat penting, karena berarti metode akuntansi bisnis tidak dapat diterapkan secara langsung tanpa adaptasi. Sebagai konsekuensinya, diperlukan pengembangan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang secara khusus disesuaikan dengan kebutuhan sektor publik untuk mengatasi tujuan dan kompleksitas unik operasi pemerintah, termasuk transaksi non-pertukaran seperti pajak dan denda.

Perkembangan Standar Akuntansi Pemerintahan di Indonesia

Ketentuan terkait Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang diterapkan di Indonesia telah mengalami evolusi signifikan. Sampai tahun 2003, penerapan SAP di Indonesia masih menggunakan basis kas. Mulai tahun 2004 hingga 2014, sistem ini bertransisi ke basis kas menuju akrual, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2005. Pada periode tersebut, pengakuan pendapatan, belanja, dan pembiayaan masih dilakukan berdasarkan kas, sementara untuk aset, kewajiban, dan ekuitas dana telah menggunakan prinsip akrual. Kemudian, sejak tahun 2015, Indonesia secara resmi menerapkan SAP berbasis akrual penuh, sesuai ketentuan PP Nomor 71 Tahun 2010 yang menggantikan PP Nomor 24 Tahun 2005. Meskipun PP Nomor 71 Tahun 2010 mengatur implementasi akrual penuh, regulasi ini tetap memberikan ruang bagi penerapan bertahap, yakni transisi dari basis kas menuju akrual ke akrual penuh. Kebijakan bertahap tersebut, dengan periode transisi dari tahun 2010 hingga 2014 dan implementasi penuh mulai tahun 2015, mencerminkan adanya kesadaran terhadap kompleksitas serta tantangan signifikan yang melekat dalam proses reformasi sistem keuangan sektor publik. Strategi bertahap ini menunjukkan pendekatan kebijakan yang realistis untuk meminimalisir risiko kegagalan dalam implementasi.

Tabel 1. Kronologi Reformasi Akuntansi Pemerintahan di Indonesia

<i>Tahun</i>	<i>Kejadian Penting / Peraturan</i>	<i>Basis Akuntansi</i>
< 2003	-	Basis kas
2003	Penerbitan UU No. 17 Tahun 2003 (Amanat penggunaan basis akrual)	-
2005	Penerbitan PP No. 24 Tahun 2005	Kas menuju akrual

	tentang SAP	
2010	Penerbitan PP No. 71 Tahun 2010 tentang SAP (Pengganti PP 24/2005)	Akrual penuh (dengan transisi)
2010-2014	Periode transisi menuju akrual penuh	Kas menuju akrual (formal), akrual penuh (persiapan)
2015	Implementasi SAP berbasis akrual penuh	Akrual penuh

Prinsip-prinsip Dasar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual

Akuntansi berbasis akrual dalam Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) merupakan seperangkat prinsip akuntansi yang digunakan untuk penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah. Dalam sistem ini, pengakuan terhadap pendapatan, beban, aset, kewajiban, dan ekuitas dilakukan berdasarkan metode akrual. Sementara itu, untuk pelaporan realisasi anggaran, pengakuan atas pendapatan, belanja, serta pembiayaan tetap mengacu pada basis yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Prinsip dasar dalam akuntansi pemerintahan mencakup unsur transparansi, ketepatan, konsistensi, dan akuntabilitas. Seluruh prinsip tersebut berperan krusial dalam menjaga kepercayaan masyarakat serta memastikan efisiensi dalam pengelolaan dan pemanfaatan anggaran negara. Selain itu, Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) juga dilengkapi dengan Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan serta sejumlah Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) yang berfungsi sebagai acuan teknis dalam penerapannya. Prinsip-prinsip ini bukan sekadar aturan teknis akuntansi, melainkan pilar fundamental untuk tata kelola pemerintahan yang baik. Pergeseran ke akuntansi akrual, dengan menyediakan informasi yang lebih komprehensif dan tepat waktu mengenai aset, kewajiban, dan biaya operasional yang sebenarnya, secara langsung mendukung tujuan kebijakan publik yang lebih luas terkait dengan tata kelola, upaya anti-korupsi, dan kepercayaan publik.

Laporan Keuangan yang Dibentuk melalui Sistem Akuntansi Akrual

Dengan implementasi penuh Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual, entitas pelaporan diwajibkan menyusun berbagai laporan keuangan, antara lain Neraca, Laporan Realisasi Anggaran (LRA) berbasis kas, Laporan Arus Kas, Catatan atas Laporan Keuangan (CALK), Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas, serta Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL). Sebagai contoh, Laporan Operasional menyajikan pendapatan dan beban yang diakui secara akrual, sehingga memberikan gambaran yang lebih menyeluruh mengenai kinerja

operasional pemerintah dibandingkan LRA yang hanya berbasis kas. Keseluruhan laporan ini dirancang untuk menyajikan informasi yang lebih komprehensif dan relevan bagi para pemangku kepentingan, sehingga mendukung evaluasi yang lebih efektif terhadap kinerja keuangan dan tingkat akuntabilitas pemerintah.

Tabel 2: Perbandingan Karakteristik Basis Akuntansi (Kas, Kas Menuju Akrual, Akrual Penuh)

<i>Karakteristik</i>	<i>Basis Kas</i>	<i>Basis Kas Menuju Akrual</i>	<i>Basis Akrual Penuh</i>
Pengakuan Pendapatan	Ketika kas diterima	Saat kas diterima	Pada saat pendapatan menjadi hak
Pengakuan Belanja/Beban	Saat kas dikeluarkan	Saat kas dikeluarkan	Saat kewajiban timbul atau aset dikonsumsi
Pengakuan Aset/Kewajiban /Ekuitas	Tidak diakui secara komprehensif	Diakui secara akrual	Diakui secara akrual
Laporan Keuangan Utama	Laporan Realisasi Anggaran	Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, CALK	Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Arus Kas, CALK, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Perubahan SAL
Keunggulan	Sederhana, mudah dipahami	Transisi, informasi aset/kewajiban lebih baik	Informasi komprehensif, akuntabilitas penuh, evaluasi kinerja lebih baik
Keterbatasan	Informasi tidak lengkap (aset, utang), tidak menggambarkan biaya operasional riil	Masih ada keterbatasan dalam pengukuran kinerja operasional	Kompleksitas tinggi, membutuhkan SDM dan sistem yang memadai

3. Metode Penelitian

Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, pendekatan kualitatif digunakan dengan desain studi literatur sebagai metode utamanya. Pendekatan tersebut dianggap tepat karena memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi dan memahami fenomena penerapan akuntansi akrual di instansi pemerintah secara mendalam. Studi literatur memungkinkan peneliti untuk menghimpun

informasi dari berbagai sumber yang relevan, termasuk jurnal, buku, dan Kebijakan tertulis yang terkait dengan penerapan akuntansi akrual. Pendekatan ini juga memberikan kesempatan untuk menganalisis berbagai perspektif dan temuan dari kajian-kajian sebelumnya sehingga menghasilkan pemahaman yang lengkap terhadap tema penelitian. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi tantangan dan solusi dalam pengaplikasian sistem akuntansi akrual di Indonesia.

Jenis Data Penelitian

Jenis data dalam penelitian ini adalah data sekunder, yang meliputi informasi yang sudah dihimpun dan dipublikasikan oleh peneliti sebelumnya, serta dokumen resmi dari lembaga pemerintah yang terkait dengan akuntansi akrual. Sumber data sekunder ini meliputi artikel jurnal, laporan tahunan, dan kebijakan yang relevan dengan pengimplementasian akuntansi akrual di sektor publik. Penggunaan data sekunder memungkinkan peneliti untuk menghemat waktu dan sumber daya, serta mendapatkan akses ke informasi yang lebih luas dan beragam. Dengan demikian, data yang diperoleh memiliki kemampuan untuk menyajikan wawasan yang lebih dalam mengenai pelaksanaan sistem akuntansi akrual pada entitas pemerintahan.

Metode Pengumpulan Data

Data dalam penelitian ini dikumpulkan melalui pendekatan studi literatur yang terstruktur. Peneliti melakukan identifikasi dan pengumpulan berbagai referensi yang relevan, seperti artikel akademik, buku, serta dokumen kebijakan yang berkaitan dengan akuntansi akrual. Tahapan ini meliputi pencarian informasi melalui database ilmiah, perpustakaan, dan sumber daring yang dapat dipercaya. Selain itu, analisis juga dilakukan terhadap dokumen resmi yang diterbitkan oleh pemerintah serta institusi terkait guna memperoleh data yang valid dan terbaru. Dengan metode tersebut, peneliti mampu menghimpun data yang lengkap dan relevan untuk memperkuat proses analisis penelitian.

Teknik Analisis Data

Teknik pengolahan data dalam penelitian ini lebih menitikberatkan pada pendekatan deskriptif dan tematik. Analisis deskriptif dilakukan untuk merangkum dan menggambarkan informasi yang diperoleh dari sumber-sumber literatur, sehingga memberikan gambaran umum tentang penerapan akuntansi akrual di instansi pemerintah. Sementara itu, analisis tematik digunakan untuk mengidentifikasi pola, tema, dan tantangan yang muncul dari data yang dikumpulkan. Dengan cara ini, peneliti dapat

mengelompokkan informasi berdasarkan kategori tertentu, seperti tantangan implementasi, kebijakan yang mendukung, dan rekomendasi dari penelitian sebelumnya. Diharapkan hasil analisis ini mampu memberikan gambaran yang lebih detail dan mendalam mengenai penerapan akuntansi akrual dan tantangan yang dihadapi oleh instansi pemerintah di Indonesia.

4. Hasil dan Pembahasan

Evolusi Penerapan Akuntansi Berbasis Akrual pada Instansi Pemerintah

Penerapan akuntansi berbasis akrual di lingkungan pemerintah Indonesia merupakan bagian dari reformasi besar dalam pengelolaan keuangan negara. Reformasi ini bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas sektor publik melalui sistem pelaporan yang lebih komprehensif dan sesuai standar internasional. Salah satu tonggak penting dalam proses ini adalah diterbitkannya PP Nomor 71 Tahun 2010 mengenai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), Merupakan dasar panduan utama bagi penerapan akuntansi berbasis akrual di seluruh instansi pemerintahan, baik pusat maupun daerah (Subhi & Yuhertiana, 2021). SAP ini menggantikan sistem sebelumnya yang berbasis kas menuju akrual, yang dinilai tidak lagi memadai dalam menggambarkan posisi dan kinerja keuangan secara menyeluruh.

Sejak tahun 2015, penerapan SAP berbasis akrual diwajibkan bagi seluruh entitas pemerintahan, selaras dengan amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 mengenai Keuangan Negara. SAP akrual mensyaratkan pencatatan transaksi keuangan berdasarkan waktu terjadinya peristiwa ekonomi, bukan saat uang kas diterima atau dikeluarkan. Melalui sistem ini, laporan keuangan pemerintah kini memuat detail terkait aset, kewajiban, dan ekuitas, yang sebelumnya tidak tercatat dalam sistem berbasis kas (Safari et al., 2024). Transformasi ini tidak sekadar modifikasi teknis, melainkan representasi dari perubahan fundamental dalam filosofi pelaporan keuangan pemerintah, menuju praktik tata kelola yang lebih bertanggung jawab dan terbuka

Namun, dalam praktiknya, penerapan akuntansi akrual tidak berjalan seragam di seluruh wilayah Indonesia. Beberapa daerah masih menghadapi kesulitan dalam memahami, menyesuaikan, dan mengimplementasikan SAP secara utuh. Hal ini menyebabkan ketimpangan implementasi antara satu instansi dengan instansi lainnya. Penelitian di Pemerintah Kota Tomohon, misalnya, mengungkapkan bahwa kendala seperti minimnya pelatihan dan sosialisasi menyebabkan implementasi berjalan lambat dan tidak optimal (Lamonisi, 2016). Dengan demikian, penerapan SAP akrual

tidak hanya membutuhkan landasan regulasi, tetapi juga kesiapan teknis dan kelembagaan di masing-masing wilayah.

Penerapan akuntansi berbasis akrual di lingkungan pemerintah Indonesia merupakan bagian dari reformasi besar dalam pengelolaan keuangan negara. Reformasi ini bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas sektor publik melalui sistem pelaporan yang lebih komprehensif dan sesuai standar internasional. Salah satu tonggak penting dalam proses ini adalah diterbitkannya PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang SAP, yang menjadi pedoman utama dalam penerapan akuntansi akrual di seluruh instansi pemerintahan, baik pusat maupun daerah (Subhi & Yuhertiana, 2021). SAP ini menggantikan sistem sebelumnya yang berbasis kas menuju akrual, yang dinilai tidak lagi memadai dalam menggambarkan posisi dan kinerja keuangan secara menyeluruh.

Mulai tahun 2015, penerapan SAP berbasis akrual diberlakukan secara wajib di seluruh entitas pemerintah, sebagai bagian dari implementasi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. SAP akrual mengatur bahwa transaksi keuangan harus diakui pada saat terjadinya peristiwa ekonomi, bukan pada saat kas diterima atau dibayarkan. Dengan sistem ini, laporan keuangan pemerintah mencakup informasi mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas yang sebelumnya tidak dicatat dalam sistem kas (Safari et al., 2024). Perubahan ini bukan hanya perubahan teknis, melainkan juga mencerminkan pergeseran paradigma dalam pelaporan keuangan pemerintahan menuju prinsip tata kelola yang lebih akuntabel dan transparan.

Namun, dalam praktiknya, penerapan akuntansi akrual tidak berjalan seragam di seluruh wilayah Indonesia. Beberapa daerah masih menghadapi kesulitan dalam memahami, menyesuaikan, dan mengimplementasikan SAP secara utuh. Hal ini menyebabkan ketimpangan implementasi antara satu instansi dengan instansi lainnya. Penelitian di Pemerintah Kota Tomohon, misalnya, mengungkapkan bahwa kendala seperti minimnya pelatihan dan sosialisasi menyebabkan implementasi berjalan lambat dan tidak optimal (Lamonisi, 2016). Dengan demikian, penerapan SAP akrual tidak hanya membutuhkan landasan regulasi, tetapi juga kesiapan teknis dan kelembagaan di masing-masing wilayah.

Dampak Positif Penerapan Akuntansi Akrual

Salah satu kontribusi penting dari implementasi akuntansi akrual adalah tersedianya informasi keuangan dengan kualitas yang lebih baik bagi seluruh pemangku kepentingan. Sistem ini memungkinkan pencatatan yang lebih akurat dan komprehensif atas seluruh aset dan kewajiban pemerintah,

termasuk yang bersifat jangka panjang seperti piutang, penyusutan aset tetap, serta kewajiban pensiun (Rosmery et al., 2016). Informasi semacam ini tidak tersedia dalam sistem akuntansi berbasis kas, sehingga akuntansi akrual memberikan keunggulan dalam mendukung perencanaan dan pengambilan keputusan yang lebih tepat.

Selain itu, akuntansi akrual juga membantu meningkatkan efektivitas pengawasan internal. Dengan data yang lebih lengkap dan mendetail, pemerintah dapat melakukan evaluasi atas kinerja keuangan secara periodik dan menyeluruh. Ini memberikan peluang lebih besar dalam mengidentifikasi penyimpangan anggaran, inefisiensi program, maupun potensi kerugian negara (Suwanda & Santosa, 2014). Lebih jauh lagi, laporan keuangan yang dihasilkan dengan akuntansi akrual menjadi sarana pertanggungjawaban kepada publik, memperkuat transparansi, dan membangun kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan keuangan negara.

Dampak positif lainnya berkaitan dengan tata kelola fiskal jangka menengah. Dengan informasi keuangan yang mencakup seluruh kewajiban dan aset, pemerintah dapat merancang strategi fiskal dan anggaran berbasis data, termasuk dalam hal perencanaan investasi publik dan pembiayaan jangka panjang. Hal ini memungkinkan pengambilan kebijakan yang lebih terukur dan berkelanjutan (Martadinata, 2024). Oleh karena itu, akuntansi akrual seharusnya tidak hanya dipandang sebagai alat administratif, tetapi sebagai kerangka strategis dalam perbaikan sistem keuangan nasional.

Tantangan Utama dalam Penerapan Akuntansi Akrual

Implementasi akuntansi berbasis akrual pada lembaga pemerintahan di Indonesia dihadapkan pada serangkaian hambatan yang kompleks. Kendala signifikan yang sering muncul adalah minimnya pemahaman serta kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) dalam bidang akuntansi pemerintahan, mengingat banyak staf yang masih terbiasa dengan metode akuntansi berbasis kas. Situasi ini menciptakan kesulitan dalam pencatatan transaksi yang mensyaratkan pengakuan hak dan kewajiban secara akrual, yang pada gilirannya dapat berdampak pada tingkat akurasi laporan keuangan. Meskipun transisi menuju akuntansi akrual merupakan modifikasi teknis dan sistematis, banyak sumber secara konsisten menyoroti kurangnya pemahaman dan keterampilan SDM sebagai hambatan utama. Ini menunjukkan bahwa bahkan dengan peraturan yang kuat dan sistem TI yang canggih, elemen manusia tetap menjadi kendala paling kritis. Kurangnya pemahaman di antara staf keuangan dapat menyebabkan kesalahan dalam penjurnalan dan penundaan pengakuan,

secara langsung merusak akurasi dan kelengkapan yang ingin dicapai oleh akuntansi akrual.

Kendala signifikan lainnya adalah sistem informasi akuntansi (SIA) yang masih terbatas dan belum termodernisasi, sehingga belum sepenuhnya mengakomodasi pencatatan berbasis akrual secara real-time atau terpadu. Penyebutan berulang tentang “kurangnya integrasi antar aplikasi” (misalnya, SAIBA dan aplikasi persediaan, SIMAK BMN dan SAIBA) menunjukkan adanya tantangan struktural yang lebih dalam daripada sekadar “keterbatasan sistem”. Ini bukan hanya tentang perangkat lunak yang usang, tetapi tentang sistem yang terpisah dan tidak dapat berkomunikasi, yang menyebabkan penundaan atau ketidakakuratan dalam pengakuan data.

Fragmentasi sistemik ini berarti bahwa meskipun komponen individual diperbarui, proses pelaporan keuangan secara keseluruhan tetap tidak efisien dan rentan terhadap kesalahan, menghambat pandangan holistik yang seharusnya diberikan oleh akuntansi akrual. Kompleksitas transaksi pemerintah, seperti pengelolaan aset tetap dan pengakuan kewajiban kontinjensi, menambah kerumitan dalam pencatatan sesuai standar akrual. Selain itu, kurangnya komitmen pimpinan dan resistensi terhadap perubahan dari internal organisasi juga menghambat implementasi yang efektif.

Studi Kasus Implementasi di Instansi Pemerintah Indonesia

Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan (Itjen Kemenkeu): Meskipun menunjukkan kesiapan implementasi yang baik (nilai 93,40%) dalam aspek komunikasi dan SDM, Itjen Kemenkeu masih menghadapi tantangan dalam pengakuan persediaan, aset tetap, aset tak berwujud, utang pihak ketiga, dan beban operasional. Masalah utama meliputi pengakuan yang tertunda hingga kas keluar (SP2D), kurangnya integrasi antar aplikasi (SAIBA, SIMAK BMN, aplikasi persediaan), dan ketiadaan regulasi rinci untuk pengungkapan tertentu atau dokumen sumber jurnal penyesuaian.

Pemerintah Kota Semarang:

Sebagai pelopor, Kota Semarang telah mengimplementasikan akuntansi berbasis akrual secara menyeluruh sejak tahun 2005, mendahului mandat PP 71 Tahun 2010. Kebijakan akuntansi mereka, termasuk pengakuan pendapatan LRA (kas diterima) dan LO (hak timbul), serta penggunaan sistem informasi akuntansi MySQL, menunjukkan pendekatan yang proaktif dan langsung dalam implementasi.

Pemerintah Kota Bandar Lampung:

Kota Bandar Lampung memulai penerapan akuntansi akrual secara informal sejak 2013, walaupun secara resmi masih berpedoman pada PP 24 Tahun 2005. Mereka mengadopsi pendekatan bertahap, yaitu dengan menyusun dua jenis laporan keuangan dan memanfaatkan Microsoft Excel untuk proses pelaporan, menunjukkan fleksibilitas adaptif selama masa transisi.

Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, UKM Kabupaten Buleleng:

Studi kasus ini menyoroti tantangan SDM, di mana banyak pegawai tidak memiliki latar belakang akuntansi, menyebabkan kesulitan dalam penjurnalan. Meskipun demikian, dinas ini menunjukkan komitmen untuk belajar dan beradaptasi melalui pelatihan berkelanjutan. Laporan operasional dinas ini menunjukkan defisit yang meningkat dari tahun ke tahun, mengindikasikan perlunya evaluasi lebih lanjut terhadap efisiensi pengelolaan anggaran berbasis akrual.

Beragamnya implementasi yang diamati dalam studi kasus ini mencerminkan kompleksitas kontekstual. Penerapan yang cepat dan menyeluruh di Semarang sangat berbeda dengan pendekatan bertahap dan non-formal di Bandar Lampung, serta tantangan unik yang dihadapi oleh Itjen Kemenkeu dan Buleleng. Keragaman ini mengindikasikan bahwa keberhasilan implementasi sangat bergantung pada faktor-faktor kontekstual seperti dedikasi pimpinan, ketersediaan sumber daya (SDM, infrastruktur TI), dan kompleksitas operasional spesifik dari entitas. Dengan demikian, penerapan akrual dengan pendekatan 'satu ukuran untuk semua' kemungkinan besar tidak akan berhasil, sehingga diperlukan strategi yang disesuaikan.

Hal-hal yang Berpengaruh pada Efektivitas Implementasi

Beberapa faktor fundamental memengaruhi efektivitas implementasi SAP akrual. Pertama adalah kualitas SDM yang memahami secara menyeluruh prinsip dan logika akuntansi akrual. Tanpa kompetensi yang memadai, risiko kesalahan dalam pencatatan sangat tinggi dan dapat berdampak pada keandalan pelaporan keuangan.

Faktor kedua adalah ketersediaan sistem informasi akuntansi yang mampu mendukung kebutuhan pelaporan secara real-time. Sistem yang terintegrasi akan membantu menyusun laporan dengan cepat, akurat, dan minim kesalahan. Jika sistem yang digunakan masih parsial, seperti dalam kasus banyak pemerintah daerah, maka koordinasi data menjadi terhambat.

Faktor terakhir yang tak kalah penting adalah komitmen organisasi, khususnya pimpinan. Dukungan dari pimpinan dalam bentuk kebijakan, penganggaran pelatihan, serta pengawasan aktif terhadap penerapan SAP sangat berpengaruh terhadap keberhasilan implementasi di lapangan.

Solusi dan Rekomendasi untuk Peningkatan Implementasi

Untuk menjawab berbagai tantangan, strategi peningkatan kapasitas SDM menjadi prioritas utama. Pelatihan, pendidikan, dan sertifikasi di bidang akuntansi sektor publik harus ditingkatkan secara berkelanjutan. Materi pelatihan juga perlu diarahkan pada praktik nyata agar peserta mampu menerapkan langsung di lingkungan kerjanya.

Penguatan sistem informasi keuangan yang terintegrasi dan adaptif terhadap pencatatan akrual menjadi kebutuhan mendesak. Sistem ini harus mampu memfasilitasi pencatatan yang cepat dan akurat di berbagai unit kerja. Pengembangan ini juga harus dibarengi dengan pembaruan perangkat keras dan pelatihan pengguna.

Selain itu, penyederhanaan prosedur pelaporan dan penguatan fungsi pengawasan juga diperlukan. Prosedur akuntansi yang kompleks hanya akan menyulitkan pelaksanaan di lapangan. Oleh karena itu, prosedur yang praktis namun tetap akurat harus dikembangkan. Solusi yang ditawarkan sebaiknya dipahami sebagai bagian dari pendekatan terpadu. Misalnya, pelatihan SDM tanpa dukungan sistem hanya akan menghasilkan kompetensi tanpa aplikasi. Sebaliknya, teknologi tanpa dukungan pengguna yang siap juga tidak akan optimal. Karena itu, strategi implementasi akuntansi akrual perlu dirancang sebagai pendekatan yang holistik, sinergis, dan disesuaikan dengan konteks masing-masing instansi.

5. Kesimpulan

Adopsi akuntansi berbasis akrual oleh entitas pemerintah adalah upaya kunci untuk mendorong keterbukaan dan pertanggungjawaban dalam manajemen keuangan publik. Sistem ini memungkinkan pencatatan transaksi ekonomi berdasarkan hak dan kewajiban yang timbul, bukan hanya berdasarkan arus kas, sehingga menghasilkan laporan keuangan yang lebih komprehensif. Penerapan SAP akrual juga sejalan dengan agenda reformasi keuangan publik dan merupakan implementasi konkret dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Meskipun regulasi dan standar telah ditetapkan secara nasional, kualitas pelaksanaan di lapangan masih beragam antar instansi. Aspek ini memperlihatkan bahwa keberhasilan tidak hanya tergantung pada regulasi

yang ada, melainkan juga pada kesiapan lembaga dan ketersediaan sumber daya yang mendukungnya.

Dari hasil studi dan kajian literatur, dapat disimpulkan bahwa manfaat akuntansi akrual mencakup peningkatan kualitas pelaporan keuangan, efisiensi pengawasan internal, serta penguatan fungsi perencanaan fiskal jangka menengah. Namun, penerapannya masih menghadapi sejumlah kendala, seperti keterbatasan pemahaman dan kompetensi SDM, fragmentasi sistem informasi akuntansi, dan ketidaksiapan infrastruktur di sebagian instansi pemerintah. Perbedaan kondisi antara pusat dan daerah juga turut memengaruhi keseragaman implementasi. Studi kasus yang dianalisis menunjukkan bahwa pendekatan pelaksanaan perlu disesuaikan dengan konteks dan kapasitas masing-masing instansi. Oleh karena itu, tidak ada satu strategi tunggal yang cocok untuk semua, dan pendekatan adaptif sangat diperlukan.

Untuk mencapai penerapan akrual yang optimal, diperlukan dukungan menyeluruh yang mencakup penguatan kapasitas SDM, modernisasi sistem informasi keuangan, serta komitmen kuat dari pimpinan organisasi. Selain itu, strategi pelaksanaan perlu dirancang secara holistik dan saling terintegrasi, bukan parsial. Kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta institusi pendidikan dan auditor menjadi kunci dalam mendukung transisi sistem ini secara menyeluruh dan berkelanjutan. Dengan pendekatan yang tepat dan sinergis, akuntansi akrual tidak hanya akan menjadi alat pelaporan, tetapi juga menjadi fondasi pengelolaan keuangan negara yang modern dan dapat dipercaya. Hal ini penting untuk menjawab tuntutan publik akan tata kelola keuangan negara yang lebih transparan, profesional, dan bertanggung jawab.

Daftar Pustaka

- Adnyani, N. M. D. R., & Diatmika, I. P. G. (2024). Analisis penerapan akuntansi berbasis akrual pada Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng. *Vokasi: Jurnal Riset Akuntansi*, 13(3), 143–151. <https://doi.org/10.23887/vjra.v13i3.83643>.
- Ahyaruddin, M. (2013). Tantangan penerapan akuntansi berbasis akrual di pemerintahan Indonesia. *ResearchGate*.
- Belinda, P. A., & Costari, N. (2021). Pentingnya implementasi akuntansi sektor publik dalam suatu instansi pemerintahan. *Jurnal Mahasiswa Akuntansi Unita*, 1(1), 58–76.
- Dedy, M., Safitri, R., & Ernayani, R. (2024). Pengaruh implementasi akuntansi berbasis akrual terhadap kualitas laporan keuangan dan

- pengaruhnya terhadap pengambilan keputusan: Studi pada SKPD Kabupaten Subang. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, 13(4), 3033–3046.
- Dewi, N. C., & Handayani, N. (2018). Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas implementasi standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, 7(3), 1–22.
- Herwiyanti, E., Sukirman, & Aziz, F. S. (2017). Analisis implementasi akuntansi berbasis akrual pada Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 19(1), 13–23. <https://doi.org/10.9744/jak.19.1.13-23>
- Indrayani, M. (2022). *Modul akuntansi sektor publik*. Institut Agama Islam Negeri Parepare, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
- Indonesia. Dewan Perwakilan Rakyat. (n.d.). *Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) (Kamus-135)*.
- Indonesia. Direktorat Jenderal Pajak. (2010, Oktober 22). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123.
- Kementerian Keuangan. (2013). Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.05/2013 Tahun 2013 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Keuangan.
- Kementerian Keuangan. (2016, Desember 30). Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Pusat (225/PMK.05/2016). Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Keuangan.
- Kementerian Keuangan. Direktorat Jenderal Perbendaharaan. (2024, Agustus 31). Evaluasi efektivitas penggunaan Standar Akuntansi Pemerintah berbasis akrual di Indonesia. Kemenkeu Learning Center.
- KPPN Watampone. (2024, September 22). Penerapan akuntansi berbasis akrual untuk meningkatkan akurasi laporan keuangan. KPPN Watampone.
- Lamonisi, S. (2016). Analisis kesiapan implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual pada pemerintah daerah: Studi pada Pemerintah Kota Tomohon. *AkMen: Jurnal Ilmiah*, 13(2), 222–230.
- Martadinata, S. (2024). Akuntansi sektor publik di Indonesia: Evaluasi implementasi sistem akrual. *Jurnal Ilmiah Governansi*, 6(3), 620–624.
- Maryati, U., Yentifa, A., & Andriani, W. (2015). Implementasi akuntansi berbasis akrual pada pemerintah daerah (Studi pada Pemerintah Kota Semarang dan Pemerintah Kota Bandar Lampung). *Jurnal Akuntansi & Manajemen*, 10(2), 1–10.

- Prayogo, Y., Fikri, A. S., & Nandini, K. P. (2023, Oktober). Analisis implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) berbasis akrual dalam penyusunan laporan pengelolaan keuangan daerah. *Jurnal Manajemen Sosial Ekonomi (Dinamika)*, 3(2), 44–58.
- Rosmery, S., Suwanda, D., & Muchidin, A. (2016). *Dasar-dasar akuntansi akrual pemerintah daerah*. Fokusmedia.
- Safari, M., Putri, A. R., & Ernayani, R. (2024). Pengaruh implementasi SAP berbasis akrual terhadap kualitas laporan keuangan SKPD. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, 13(4), 3037–3039.
- Safitri, R., Setiadi, A., & Riyanto, S. (2023). Implementasi akuntansi berbasis akrual dalam tata kelola keuangan negara. *Kajian*, 28(1), 1–18.
- Subhi, A., & Yuhertiana, I. (2021). Peran sumber daya manusia dan teknologi informasi terhadap implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Humanika*, 11(1), 140–148.
- Suwanda, D., & Santosa, P. W. (2014). *Kebijakan akuntansi berbasis akrual: Konsep, implikasi dan aplikasi*. Fokusmedia.
- Universitas Terbuka. (2022). *Modul gambaran umum akuntansi berbasis akrual*. Fakultas Ekonomi, Universitas Terbuka.
- Zalfaa, K. (2024, November 5). *Pahami definisi akuntansi pemerintahan, tujuan, prinsip, dan contohnya*. MyEduSolve. <https://myedusolve.com/id/blog/pahami-definisi-akuntansi-pemerintahan-tujuan-prinsip-dan-contohnya>.